

**PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI
DESA NUSANTARA JAYA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR TAHUN 2015**

Oleh :

Novy Rahman

novyrahman@yahoo.com

Pembimbing : Dadang Mashur, S.Sos, M,Si

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau , Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru
Pekanbaru 288293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The village administration is spearheading national development which is led by a village chief as the holder helm of the highest in the country, as the main determinant for success in rural development. As supreme leader, village head should perform well in the governance process stipulated in Law No. 6 2014. Implementation of Rural Infrastructure Development is the development of village infrastructure such as public facilities and infrastructure. Implementation of village infrastructure development such as public facilities and infrastructure aims to improve the welfare of people and improve human resources, expected in order to improve a better life, which is implemented through a pattern of community empowerment. However, irregularities in implementation of rural infrastructure development, this was due to lack of supervision in the implementation of rural infrastructure development. The purpose of this study is to identify and analyze the implementation of infrastructure development in the village of Desa Nusantara Jaya subdistrict Keritang Indragiri Hilir.

The concept of the theory used is the management which includes planning, organizing, implementation and supervision. To analyze the implementation of rural infrastructure development in the Village Nusantara Jaya subdistrict Keritang Indragiri Hilir, researchers used the theory of George R.Terry in Manullang (2012: 8), this study uses qualitative research methods to study descriptively. In collecting the data, the authors use the technique of interview, observation and documentation. By using key informen as a source of information and as a source triangulation techniques in testing the validity of the data.

The results of this study indicate that the implementation of rural infrastructure development are not fully implemented in accordance with existing regulations. In the implementation of rural infrastructure development is still the occurrence of irregularities in the process of development of rural infrastructure. Meanwhile inhibiting factors in the implementation of rural infrastructure development is the budget or the perceived costs less. Inaccuracy of materials, time and labor in the implementation of rural development.

KeyWords: Implementation, Development, Rural Infrastructure.

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pencapaian kesejahteraan masyarakat dilalui dengan jalan perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, perubahan tersebut dilakukan melalui pembangunan. Tujuan pembangunan masyarakat ialah perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, sehingga kemiskinan dan lingkungan hidup masyarakat mengalami perubahan. Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang lebih demokratis sebagai upaya dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan, pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada desa untuk lebih menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan undang-undang tersebut adalah melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan langkah baru untuk

membenahi penyelenggaraan pemerintah, melalui otonomi dan desentralisasi yang diharapkan mampu melahirkan partisipasi aktif masyarakat dan menumbuhkan kemandirian pemerintah desa. Adanya kebijakan otonomi telah memberikan kewenangan kepada desa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang pada masyarakat. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam seluruh proses kebijakan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan.

Selanjutnya, dalam penelitian ini potensi yang akan dilihat adalah penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Permasalahan mengenai penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa yang penulis temukan di Desa Nusantara Jaya adalah tentang pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015?

- b. Faktor-faktor Apa Saja yang Menghambat Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015.
- b. Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang Menghambat Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai permasalahan dan juga masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat di Kecamatan Keritang dalam melaksanakan pembangunan.
- c. Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan.

1.4 Konsep Teori

Adapun konsep teori yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Pemerintahan Desa

Pengertian Pemerintahan Desa menurut **Suprihatini (2007: 9)** yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan badan perangkat desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan desa.

Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Wewenang pemerintahan desa yaitu mengatur, mengurus kepentingan masyarakatnya, dan mendamaikan perkara dari para warganya. Pemerintahan desa berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa. Fungsi pemerintahan adalah memimpin, memberi petunjuk, memerintah, mengarahkan, koordinasi, pengawasan dan inovasi dalam pemerintahan (**Hamdi, 2006: 22**).

1.4 Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

1.7.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menggambarkan bagaimana Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu dengan mengambil studi kasus di salah satu Desa yaitu Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang. Alasan pemilihan lokasi didasari atas ketertarikan penulis untuk mengetahui dan mamahami tentang Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015.

1.7.3 Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data dan informasi, serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, adapun pengertiannya yaitu suatu teknik sampel yang mengambil informan

kunci yang dianggap mengetahui permasalahan dan objek yang akan diteliti dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono : 2005 : 96).

1.7.4 Jenis dan sumber Penelitian

Menurut Lofland dalam Moleong (2012:157) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut cara pengumpulannya, secara garis besar data penelitian dibedakan menjadi dua jenis, antara lain sebagai berikut:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari informan dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu berupa hasil wawancara mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari laporan, buku-buku/catatan, dokumen-dokumen dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu data berupa dokumen tentang Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 yang dapat mendukung dan menjelaskan objek yang sedang diteliti.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung dengan objek penelitian guna mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian.

b. Wawancara

Yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan informan secara mendalam yang dianggap mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara akan dilakukan dengan orang-orang tertentu yang terkait dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Sedangkan Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya.

1.7.6 Analisa Data

Analisis data menurut **Moeloeng (2005:280)** adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satu uraian dasar. Analisis data yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumen dari instansi terkait dan sumber-sumber lain. Kemudian data-data tersebut

dianalisa secara kualitatif yang selanjutnya dijabarkan secara deskriptif atau dijabarkan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyelenggaraan

Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015

Salah satu yang menjadi unsur penentu keberhasilan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa adalah perencanaan, apabila perencanaannya sudah tersusun secara terperinci dan jelas maka penyelenggaraan pembanguan infrastruktur desa bisa sesuai dengan yang direncanakan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sarnubi, selaku Kepala Desa Nusantara Jaya, mengatakan :

“Dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa tentu perlu ada perencanaan, rencana dasarnya yaitu pencapaian tujuan beserta visi misi dari desa, perencanaan awal kami adalah untuk mewujudkan visi misi memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, serta pemerataan

*pembangunan.”(S
abtu, 8 Oktober
2016)*

Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa digunakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur desa. Perencanaan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa telah dilakukan oleh Pemerintah Desa yang diwujudkan dalam perencanaan awal. Adapun perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dapat dilihat dari wawancara dengan Bapak Sarnubi, selaku Kepala Desa Nusantara Jaya mengatakan :

*“Mulai
dari Desa tentang
anggaran berapa
ADD kita sanggup
untuk
melaksanakan
pembangunan
fisik dan non fisik,
kemudain
berkoordinasi
kepada BPD dan
BPD kemudian
melakukan
musrenbangdes
dengan tokoh
masyarakat
tentang anggaran
dan pembangunan
sarana
infrastruktur
umum apa yang
sangat diperlukan
di Desa.”(Sabtu, 8
Oktober 2016)*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aripin selaku BPD di Desa Nusantara Jaya, mengatakan :

*“Perencanaannya
itu pertama kami
meminta
masyarakat untuk
mengusulkan apa
saja yang menjadi
kebutuhan
masyarakat pada
umumnya,
kemudian BPD,
Pemerintahan
Desa memberi
masukan tentang
besaran ADD
yang diterima dari
Pemerintah
kabupaten
Indragiri Hilir
yang bisa
digunakan untuk
pembangunan
fisik dan non fisik,
kemudian kalo
hasil
musrenbangdes
sudah sesuai.
Kami akan
berkoordinasi
dengan Pemerintah
Desa dan Tenaga
Pendamping Desa
untuk di
rampungkan hasil
musrenbangdes
tersebut.”(Senin,
10 Oktober 2016)*

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa perencanaan dalam hal pembangunan infrastruktur desa mulai dari anggarannya berasal dari ADD yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Apabila sudah dilakukan Musrenbangdes oleh BPD sampai dengan penyerahan berkas kepada pemerintah desa tidak langsung

menyetujui tetapi melakukan pengecekan terlebih dahulu.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran-saran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015. Untuk lebih jelasnya akan penulis sajikan kesimpulan dan saran-saran tersebut sebagai berikut :

4.1 Kesimpulan

Setelah melakukan kajian analisis berdasarkan temuan-temuan dan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, dengan ini dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 telah dilaksanakan dengan baik pada setiap tahapannya, meskipun masih ada beberapa kendala dan masalah didalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut, terletak pada kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pelaksana yang terlibat, sehingga terjadinya miskomunikasi dan mispersepsi. Miskomunikasi dan mispersepsi tersebut mengakibatkan: penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa tidak selesai di bangun. Kemudian tidak optimalnya pengawasan pemerintah desa beserta unsur-unsur pemerintahan desa membuat salah satu pembangunan

infrastruktur tidak layak pakai.

- b. Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tidak terlepas dari adanya faktor penghambat yaitu masalah ketersediaan anggaran dana yang dianggap masyarakat masih kurang. Kemudian ketidaktepatan material bahan bangunan, waktu dan hambatan lainnya yaitu tenaga kerja.

4.2 Saran

Setelah penulis melakukan penelitian penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa, maka penulis akan memberikan sebuah masukan untuk mengevaluasi dari hasil pelaksanaan dalam sebuah saran sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa beserta unsur-unsur pemerintahan desa harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa agar penyalahgunaan bahan material tidak terjadi lagi. Pengawasan yang optimal juga bisa mencegah terjadinya kegagalan pembangunan infrastruktur desa dan kemudian tidak menimbulkan prasangka-prasangka yang tidak baik dikalangan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus menyusun standarisasi pembangunan infrastruktur dan indikator keberhasilan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pemerintah lebih mudah mengukur

capaian dari pembangunan tersebut. Diharapkan kepada Pemerintah Desa dan unsur-unsur pemerintahan dapat menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dengan rasa tanggungjawab dan jujur. Pemerintah Desa harus cepat tanggap, berkoordinasi dengan Instansi Pemerintahan lainnya dan membuat regulasi terhadap permasalahan yang terjadi mengenai pembangunan infrastruktur agar bisa menjamin kesejahteraan masyarakat dan terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

Dikarenakan faktor penghambat ialah susahnya pengadaan bahan/material pasir dan batu. Langkah-langkah yang dapat dilakukan ialah dengan membuat perencanaan pembangunan yang lebih bagus lagi, salah satunya dengan berkoordinir dengan pihak penambang pasir dan batu untuk memboking dan mempersiapkan pasokan material pasir dan batu jauh hari sebelum tahap pengerjaan pembangunan dimulai. Dengan perencanaan yang matang akan memperlancar atau mempercepat pengerjaan pembangunan infrastruktur desa. Kemudian Ditambah cuaca yang buruk menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa karena pembangunan akan berjalan lambat dan tidak tepat waktu dikarenakan hujan turun. Untuk itu bisa ditanggulangi dengan menambah tenaga kerja sehingga apabila cuaca sedang mendukung para tenaga kerja

bisa dengan cepat melakukan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006.
Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Afiffudin. 2010.
Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep Teori Dan Implikasinya Di Era Reformasi. Alfabeta : Bandung.
- Ardianto, Harun Elvinaro. 2012. *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Badrudin, 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta: Bandung.
- Hakim, Lukman. 2011.
Pengantar Administrasi Pembangunan. Ar-Ruzz Media : Jogjakarta.
- Hamdi, Muklis. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamidjojo, Santosa. S. 1978. *Partisipasi dalam Pembangunan*. Universitas Pajajaran, Bandung.
- Handoko, T. Hani. 2003.
Manajemen Edisi 2. BPFE : Yogyakarta.
- Hasibuan, Melayu. 2005.
Manajemen Edisi 2. BPFE : Yogyakarta.

- Kasim, Iskandar. 2005. *Manajemen Perubahan*. Alfabeta: Bandung.
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan Pendekatan Konsep Dan Implementasi*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Manullang, 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. UGM : Yogyakarta.
- Moleong, J, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- _____. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nasution, Zulkarimen. 2007. *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori Dan Pengenalannya*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Nawawi, H. 2009. *Manajemen Strategi Organisasi Non-Propit Bidang Pemerintahan*. UGM : Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____. 2003. *Kronologi: Ilmu Pemerintahan Baru*. Direksi Cipta : Jakarta.
- Nucholis, Hanif. 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo, Jakarta.
- Prijono, Onny S dan A. M. W Pranarka. 1996. *Pemberdayaan: Konsep Kebijakan dan Implementasi*. CSIS : Jakarta.
- Rasyid, M. Ryaas. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Riduwan. 2012. *Belajar Mudah Penelitian*. Alfabeta : Bandung.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia dari Teori ke Praktek*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- _____. 2001. *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strateginya*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Siswanto, HR. 2005. *Pengantar manajemen*. Ikrar Mandiri Abadi : Jakarta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT. Refika Aditama : Bandung.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Gaya Media : Yogyakarta.

Suprihatini, Amin. 2007. *Pemerintah Desa dan Kelurahan*. Cempaka Putih, Klaten.

Syafiie, K. Inu. 2006.
Ilmu Administrasi Publik.
Rineka Cipta : Jakarta.

_____, 2007. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Bumi Aksara, Jakarta.

_____, 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT. Refika Aditama : Bandung.

Terry, G.R. 2006. *Dasar-dasar Manajemen*. PT. Rineka Cipta : Jakarta.

Trijono, Lambing. 2007.
Pembangunan Sebagai Perdamaian.
Yayasan Obor Indonesia : Jakarta

Yahya, Yohannes, 2006.
Pengantar Manajemen.
Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang republic Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
Tentang Desa